

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang diawali pada tahun 1998 dengan tergesernya paradigma desentralisasi administratif yang dianut Orde baru, menjadi desentralisasi politik pasca UU. NO. 22 Tahun 1999 tentang pemekaran pembangunan daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Diera reformasi merupakan konsekuensi logis dari penerapan kebijakan desentralisasi politik oleh pemerintah pusat. Menurut Simanjuntak (2013:109) maraknya pembangunan yang berlangsung sejak Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dijalankan membuat daerah-daerah bergegas dan mengambil kesempatan untuk mengejar ketertinggalan daerah-daerahnya.

Dengan desentralisasi politik maka pemerintah pusat membentuk daerah-daerah otonom atau daerah yang mempunyai pemerintah, yaitu daerah yang mempunyai wilayah, masyarakat hukum, kepala daerah dan anggota DPRD yang dipilih oleh rakyat, pegawai dan kewenangan serta mengatur dan mengurus daerah. Kebijakan pemekaran daerah paska ditetapkannya UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah mempunyai perbedaan yang signifikan jika dibandingkan pengaturan pemekaran daerah berdasarkan UU No.5 Tahun 1975 tentang sistem sentralistik lebih mengarah pada penyeragaman dibawah kendali pemerintah pusat. Dalam masyarakat yang majemuk (pluralistis), bentuk ini tentu saja tidak menggambarkan kenyataan yang ada sehingga berpotensi timbulnya ketidakpuasan masyarakat. Bahkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan,

cenderung menimbulkan gejolak pemberontakan daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Proses pembangunan daerah sering kali menjadi proses yang tertutup dan menjadi arena terbatas dikalangan pemerintah pusat. Setelah konsep otonomi daerah diberlakukan maka daerah-daerah yang merasa pembangunan di daerahnya masih tertinggal, maka menginginkan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah terjadi karena adanya ketimpangan-ketimpangan pembangunan dan tidak meratanya sektor-sektor pembangunan di semua wilayah, sementara potensi yang dimiliki wilayah memungkinkan untuk dikembangkan sebagai sumber-sumber penghasilan pembangunan.

Sesuai dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sumatera Utara dan adanya aspirasi masyarakat yang berkembang, maka dibentuk Kabupaten Pakpak Bharat berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Pakpak Bharat di Provinsi Sumatera Utara sebagai wujud akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberi kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah sehingga menjamin perkembangan kemajuan di masa yang akan datang. Dilihat dari segi potensi sumber daya alamnya, wilayah yang masuk Kabupaten Pakpak Bharat banyak menghasilkan komoditi kemenyan dan nilam.

Komoditi ini merupakan salah satu sumber pendapatan wilayah Kabupaten Pakpak Bharat tersebut. Sedangkan dari sumber daya manusianya, terlihat bahwa masyarakat Pakpak sudah memiliki potensi untuk mengembangkan wilayah,

karna jika dilihat dari tingkat pendidikan sudah banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan telah siap mengabdikan untuk wilayah Pakpak Bharat.

Sejak terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat Bupati dan Aparatur pemerintahan selangkah demi selangkah mulai melakukan pembangunan di berbagai sektor yaitu pembangunan sarana umum dan perkantoran. Keadaan pembangunan tersebut merupakan wujud nyata dari pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat.

Secara umum Pakpak Bharat digolongkan sebagai bagian dari suku bangsa batak, seperti halnya Toba, Simalungun, Karo dan Mandailing. Orang Pakpak dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian berdasarkan wilayah komunitas marga dan dialek bahasa yang di kenal yakni, (Berutu dan Nurbani 2008 : 3) Pakpak Simsim, Pakpak Keppas, Pakpak Pegagan, Pakpak Kelasen dan Pakpak Boang.

Hampir 90% penduduk di Pakpak Bharat beretnis Pakpak. Berbeda dengan Kabupaten induknya, kabupaten Dairi yang terdiri dari berbagai macam suku, seperti Pakpak, Batak Toba, Mandailing, Nias, Karo, serta suku-suku lainnya. Kemungkinan besar inilah yang menjadi alasan Pakpak Bharat untuk pemekaran dari Kabupaten Dairi.

Pada tanggal 28 Juli 2003, Pakpak Bharat mengalami pemekaran yang tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan penggarapan potensi, percepatan pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi wilayah terutama pembangunan sumber daya manusia. Ketika pemerintahan Muger Hery, Pakpak Bharat mengalami kemajuan yang sangat tinggi dalam bidang pendidikan.

Kabupaten Pakpak Bharat sudah 12 tahun lamanya pemekaran dan telah dipimpin oleh 4 Bupati yakni, Drs. Tigor Solin, Ir. Muger Hery Immanuel Berutu, MBA, H. Makmur Berasa dan Dr. Remigo Yolando Berutu, MBA

Pemerintahan sebelum Muger Hery yakni Drs.Tigor Solin, hanya mengfokuskan kemajuan dalam bidang pertanian di Pakpak Bharat. Padahal, pendidikan merupakan hal paling pokok untuk memajukan suatu bangsa termasuk memajukan daerah itu sendiri seperti daerah Pakpak Bharat.

Jika dilihat secara umum pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pendidikan bisa diperoleh dari lingkungan keluarga (pendidikan informal), masyarakat (pendidikan nonformal) dan juga dari sekolah (pendidikan formal) mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sudah bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan tingkatan dan potensi yang dimilikinya. Dulu Pakpak Bharat hanya memiliki SD dan SMP itu pun hanya satu sekolah, dan SMA pun belum ada, sehingga masyarakat pakpak bharat yang ingin melanjutkan pendidikan hanya bisa melanjutkan ke SPG (Sekolah Pendidikan Guru) ke Kabupaten lain yaitu Kabupaten Dairi.

Melihat keadaan ini, masyarakat Pakpak merasa lelah karena harus berjalan kaki melewati pegunungan dan jalan setapak menuju Sidikalang untuk melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, masyarakat Pakpak Bharat akhirnya mendirikan sekolah SMA Swasta Sada Aarih sekitar tahun 1966. Ir. Muger Hery Immanuel Berutu, MBA memfokuskan kemajuan pendidikan sebagai tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat Pakpak yaitu dengan memberikan bantuan beasiswa bagi orang yang kurang mampu. Kesempatan pada seluruh siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selama masa jabatan Muger Hery, sekolah-sekolah sudah semakin banyak, SD berdiri sekitar 56 sekolah, SMP sekitar 12 sekolah, dan SMA 8 sekolah setiap Kecamatan.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat yang merupakan hasil pembangunan dari Kabupaten Dairi. Dengan demikian peneliti mengangkat Judul Kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat paska pemekaran Kabupaten Dairi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian berikut :

1. Kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat Paska Pemekaran Kabupaten Dairi.
2. Kondisi pendidikan dan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat sebelum pemekaran daerah.

3. Faktor-faktor pendukung kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat.
4. Faktor pelayanan publik yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

1.3 Pembatasan Masalah

Sebagaimana uraian masalah pada identifikasi masalah, peneliti merasa perlu membuat pembatasan masalah yang terbatas pada kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat paska pemekaran dari Kabupaten Dairi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas pendidikan di kabupaten Pakpak Bharat paska pemekaran dari Kabupaten Dairi?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat paska pemekaran Kabupaten Dairi.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Memberikan gambaran tentang kualitas pendidikan di Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Sebagai perbandingan bagi mahasiswa pendidikan PPKn maupun bagi jurusan lainnya dengan bidang penelitian yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda untuk menghasilkan keputusan yang sempurna.
3. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat di dalam pengetahuan mengenai perkembangan daerah

Kabupaten Pakpak Bharat sebagai hasil kualitas pendidikan dari Kabupaten Dairi.

4. Sebagai bahan referensi dan acuan bagi peneliti berikutnya yang relevan dengan topik penelitian.



THE
Character Building
UNIVERSITY